



Cetakan Ke 2

Buku Tanya Jawab seputar

Pembentukan Peraturan Daerah *dan*

Peraturan Kepala Daerah

Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia
Dengan Japan International Cooperation Agency

Tim Penyusun

Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab

Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.H.

Pengarah

1. Muhammad Akram, S.H., M.Si.
2. Widyastuti, S.H., M.H.
3. Cahyani Suryandari, S.H., M.H.
4. Unan Pribadi, S.H., M.H.
5. Aisyah Lailiyah, S.H., M.Hum.
6. Dr. Roberia, S.H., M.H.
7. Hernadi, S.H., M.H.
8. M. Waliyadin, S.H., M.Si.
9. Alexander Palti, S.H., M.H.
10. Rudi Hendra Pakpahan, S.H., M.Hum.

Ketua

Andriana Krisnawati, S.H., M.H.

Sekretaris

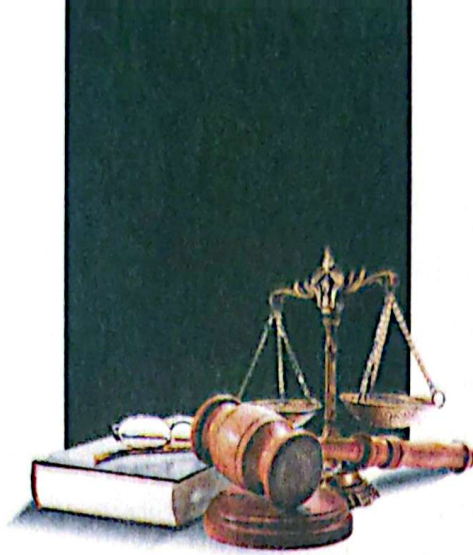
Reni Oktri, S.H., M.H.

Anggota

1. Andrie Amoes, S.H., M.H.
2. Nurfaqih Irfani, S.H., M.H.
3. Siti Masitah, S.H., M.H.
4. Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H.
5. Tri Wahyuningsih, S.H., M.H.
6. Desi Khairani, S.E., Ak., M.H.
7. Victor Stanny Hamonangan, S.H., M.Hum.
8. Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H.
9. Yeni Nel Ikhwani, S.H., M.H.
10. Nurul Hidayah, S.H.
11. Irma Wahyuni, S.H., M.H.
12. M. Manzilah Falah, S.H., LL.M.
13. Dwi Retnaningtyas, S.H., M.Si.
14. Yulanto Araya, S.H., M.H.
15. Kadek Aditya Vermana, S.H.
16. Prahesti Sekar Kumandhani, S.H., M.H.
17. Putri Sekarinda, S.H.
18. Rafika Usnah Aulia, S.H.
19. Partika Novianti, S.Si.
20. Devi Novita, S.Kom.
21. Debby Osriwany Hutaauruk, S.Kom.

Tim JICA Project

1. Eriko KIKUCHI
2. Yukiko MAZAWA
3. Prita Novianti, S.S.



KATA PENGANTAR

**DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) telah meluncurkan buku “Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah”, yang merupakan literatur resmi dalam menjawab permasalahan dan perbedaan pemahaman yang timbul dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah khususnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Buku ini hadir untuk mengatasi persoalan perbedaan sudut pandang dan penafsiran terhadap ketentuan pasal, ayat, dan lampiran dalam proses dan teknik penyusunan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Penjabaran rinci untuk menjawab persoalan dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mendasari pada Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut, ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya juga menjadi acuan dalam penyusunan buku ini.

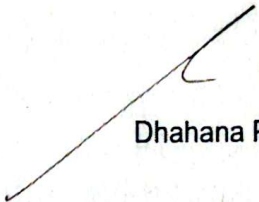
Fokus Kementerian Hukum yang salah satunya pada perkembangan hukum dan perundang-undangan di Indonesia menjadi alasan dalam penyempurnaan buku ini. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berpengaruh pada pertanyaan dan jawaban mengenai ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang menjadi bagian dalam rangkaian Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah.

Lahirnya buku “Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Cetakan Kedua” ini juga tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi berbagai pihak. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para narasumber: Ibu Cahyani Suryandari, Bapak Albert Aries, dan Bapak Muhammad Fatahillah atas sumbangsih pemikiran dan pendapat guna penyempurnaan materi ketentuan pidana. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Japan International Cooperation Agency (JICA) atas kemitraan dan dukungannya untuk mengembangkan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan pembentuk Peraturan Perun-

dang-undangan dalam membentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah di Indonesia.

Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi setiap pihak yang ikutserta dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh pemahaman yang sama terhadap problematika praktik pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta mendukung agenda dan kebijakan pemerintah perkembangan hukum di Indonesia.

Jakarta, Februari 2025
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan



Dhahana Putra